



RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH



PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026** dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terencana, terukur, dan akuntabel. Renja 2026 disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masukan, saran, dan kerja sama yang konstruktif sangat membantu kami dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Dengan semangat kebersamaan dan integritas.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan Buku Rancangan Akhir Renja ini, kami harapkan saran perbaikan untuk penyempurnaan dan semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini merupakan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang disusun berpedoman kepada Renstra Setda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan bagian dari tahapan sistem penganggaran.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusunan Rancangan Renja Tahun 2026 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja ini adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai Dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah agar dapat menjamin

keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sedangkan tujuan penyusunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Menyediakan acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026 secara terpadu, terarah dan terukur;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2026;
- 4) Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memuat beberapa bab pokok yaitu :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | Memuat hal-hal umum tentang pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. |
| BAB II | Memuat evaluasi capaian kinerja Biro Setda Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan. |
| BAB III | Memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilakukan 1 (satu) tahun anggaran. |
| BAB IV | Penutup |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Evaluasi disini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja masing-masing program yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Kegiatan Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran sebesar Rp.1.766.924.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sampai dengan Desember 2024 yaitu sebesar Rp.1.399.480.093,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Secara detail pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Biro Adminstrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan indikator terwujudnya tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat rutin. Alokasi untuk melaksanakan program ini sebesar Rp.1.016.924.000,- (Satu Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Penjelasan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.559.300,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan capaian 70,24 %.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator tersedianya dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN. Pagu anggaran untuk

sub kegiatan ini adalah Rp.111.160.000,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.111.160.000,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian 100%.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya dengan indikator tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp.52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.900.000,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan capaian sebesar 98,86%.
- Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator Terlaksananya pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.286.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan capaian sebesar 97,62%.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator terlaksananya jumlah orang yang mengikuti bimbingan dan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Sub kegiatan tersebut tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya undangan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran. Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.63.235.900,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan capaian sebesar 63,24%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator tersedianya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pagu anggaran sebesar Rp.329.600.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.272.170.726,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan capaian sebesar 82,58%.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia. Pagu anggaran sebesar Rp.85.900.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.85.520.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian sebesar 99,56%.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Terlaksananya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran. Pagu anggaran sebesar Rp. 276.764.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 192.573.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua juta Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan capain sebesar 69,58%.

2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Biro Adminstrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan indikator Persentase penyerapan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan rencana dan target. Adapun target program sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Alokasi untuk melaksanakan program ini sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Penjelasan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan dana APBD Provinsi. Pagu anggaran Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan realisai keuangan sebesar Rp. 139.494.595,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan capaian sebesar 69,75%.
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan dana APBN Provinsi. Pagu

anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.888.601,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) dengan capaian sebesar 81,72%.

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan wilayah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 100.683.737,- (Seratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan capaian sebesar 91,53%.

2) Kegiatan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan indikator tersedianya jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.167.570,- (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) capaian sebesar 53,79%.
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator tersedianya jumlah laporan hasil pelaksanaan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.661.780,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan capaian sebesar 76,06%.
- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah dengan indikator tersedianya jumlah dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah. Pagu anggaran Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan capaian sebesar 93,80%.

Adapun secara rinci untuk penyerapan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada gambar dibawah berikut ini:

Gambar 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Adm. Pembangunan TA 2024



B. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.794.400.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1.1.1.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*

2.1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.1.1.2.1 *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

2.1.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.1.3.1 *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2.1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.1.4.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

2.1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.2.1.1 *Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.1.2 *Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.1.3 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

2.1.2.2.1 *Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik*

2.1.2.2.2 *Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.2.3 *Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.3. Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.2.3.1 *Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ*

2.1.2.3.2 *Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.3.3 *Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 1.529.400.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

2.1.1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 250.400.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah); Untuk pembayaran Honorarium KPA dan PPTK sesuai Standar Biaya Umum.

Realisasi Keuangan : Rp.188.560.000 (75,30%)

Realisasi Fisik : 100 %

2.1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Untuk Biaya perjalanan dinas rutin kantor dalam daerah dan luar daerah selama Tahun 2024

Realisasi Keuangan : Rp.68.397.713 (91,20%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Untuk Pembelian sarana dan prasarana untuk kantor pada Biro PBJ;

Realisasi Keuangan : Rp.119.550.000 (28,46%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Tenaga Kerja Honorer 15 (lima belas) orang dan 4 (empat) orang TKPD
 - b. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
 - c. Belanja Alat Kebersihan Kantor

Realisasi Keuangan : Rp.506.106.500 (65,65%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.1. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu :

2.1.2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisa pasar .
 - b. penyusunan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa.
 - c. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan

Realisasi Keuangan : Rp.157.731.670 (85,26%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
Realisasi Keuangan : Rp.164.512.157 (99,70%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan Rapat Koordinasi UKPBJ Tingkat Provinsi Tahun 2024;

Pelaksanaan Katalog Lokal;

Pelaksanaan Tender PBJ;

Realisasi Keuangan : Rp.761.562.243 (97,64%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.2.2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
Untuk pembayaran sewa Internet, *Mail Server*, sewa Rak *Colocation* selama 1 (satu) tahun.

Realisasi Keuangan : Rp.638.441.978 (88,67%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
Untuk pembayaran pemeliharaan *software* selama 1 (satu) tahun dan Monev LPSE;

Realisasi Keuangan : Rp.190.109.976 (97,49%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
Pengelolaan Informasi terkait pengadaan Barang dan Jasa berupa dokumentasi dan penyampaian informasi terkait pengadaan barang dan jasa berupa video, spanduk dan baleho.

Realisasi Keuangan : Rp.198.837.534,- (94,68%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.2.3. Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ dengan anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ, Peningkatan Kompetensi SDM PBJ, Workshop, Ujian Sertifikasi PBJ serta biaya kontribusi Bimtek Personil Pengelola PBJ Tahun 2024.

Realisasi Keuangan : Rp.676.593.107 (93,97%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Penyusunan Tingkat Kematangan UKPBJ, Rakor Jabfung UKBPJ Kab/Kota.

Realisasi Keuangan : Rp.261.410.731,- (95,06%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah); Pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan pendampingan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan UKPBJ Kab/Kota dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pelaksanaan Bimtek Personil UKPBJ pada OPD dan Kabupaten/Kota.

Realisasi Keuangan : Rp.1.000.039.069,- (98,53%)

Realisasi Fisik : 100%

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.794.400.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Realisasi Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.873.252.678,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah atau 84,10 % dari total anggaran.

Realisasi Fisik per 31 Desember 2024 sebesar 100 %.

C. BIRO ORGANISASI

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun berjalan (2025) telah dievaluasi untuk mengukur sejauh mana target yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada capaian kuantitatif, tetapi juga menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk menyusun program kerja yang lebih efektif pada tahun 2026.

Berdasarkan laporan tingkat realisasi fisik program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berjalan per 9 September 2025 mencapai 60%, sementara tingkat realisasi keuangan berada di angka 55,53%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang solid dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan, Rincian Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2025 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi			SILPA	
			Keuangan		Fisik	(Rp.)	%
			(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,203,413,200	783,366,336	65.10 %	66%	420,046,864	575.08%
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,500,000	6,994,500	34.12 %	37%	13,505,500	65.88%
1	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,500,000	6,994,500	34.12 %	37%	13,505,500	65.88%
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	170,000,000	122,270,000	71.92 %	72%	47,730,000	28.08%

2	Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170,000,000	122,270,000	71.92 %	72%	47,730,000	28.08%
III.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172,173,200	90,885,317	52.79 %	55%	81,287,883	227.55%
3	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	101,373,200	75,715,397	74.69 %	75%	25,657,803	25.31%
4	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30,960,000	9,909,920	32.01 %	33%	21,050,080	67.99%
5	Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	31,840,000	0	0.00%	30%	31,840,000	100.00 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi			SILPA	
			Keuangan		Fisik %	(Rp.)	%
			(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	8,000,000	5,260,000	65.75 %	68%	2,740,000	34.25%
7	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	0	0	0.00 %	0%	0	0.00%

	Peraturan Perundang-Undangan						
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	344,700,000	167,873,019	48.70 %	50%	176,826,981	171.95%
8	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,000,000	38,171,935	41.95 %	42%	52,828,065	58.05%
9	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226,500,000	120,787,230	53.33 %	55%	105,712,770	46.67%
10	Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	27,200,000	8,913,854	32.77 %	35%	18,286,146	67.23%
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,000,000	79,649,500	99.56 %	100%	350,500	0.44%
11	Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0.00 %	0%	0	0.00%
12	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80,000,000	79,649,500	99.56 %	100%	350,500	0.44%

VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237,540,000	167,414,000	70.48 %	71%	70,126,000	29.52%
13	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237,540,000	167,414,000	70.48 %	71%	70,126,000	29.52%
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178,500,000	148,280,000	83.07 %	84%	30,220,000	51.66%
14	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	120,000,000	120,000,000	100.0 0%	100%	0	0.00%
15	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58,500,000	28,280,000	48.34 %	50%	30,220,000	51.66%
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	918,544,600	395,039,192	37.81 %	40%	523,505,408	469.16%
VIII.	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	317,460,000	80,767,186	23.63 %	35%	236,692,814	229.11%
16	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	80,560,000	10,710,000	13.29 %	35%	69,850,000	86.71%
17	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	76,900,000	20,448,088	26.59 %	30%	56,451,912	73.41%

18	Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	160,000,000	49,609,098	31.01 %	35%	110,390,902	68.99%
IX.	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	601,084,600	314,272,006	51.99 %	55%	286,812,594	240.05%
19	Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	142,070,000	73,315,088	51.60 %	55%	68,754,912	48.40%
20	Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	167,019,600	108,719,670	65.09 %	70%	58,299,930	34.91%
21	Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	77,860,000	47,943,400	61.58 %	65%	29,916,600	38.42%
22	Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	128,135,000	42,745,665	33.36 %	35%	85,389,335	66.64%
23	Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	86,000,000	41,548,183	48.31 %	50%	44,451,817	51.69%
	Total	2,121,957,800	1,178,405,528	55.53 %	60%	943,552,272	44.47%

D.BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

Rencana Strategi (Renstra) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dalam rangka melaksanakan kebijakan dibagian Umum dan Perlengkapan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan penetapan sasaran strategis dalam Renstra Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan, telah memperhatikan penggunaan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang menjadi ukuran keberhasilan unit-unit kerja organisasi. Ukuran-ukuran atau indikator-indikator keberhasilan ini termasuk di dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja di berbagai unit kerja dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, penganggaran dan perjanjian kinerja. Pengukuran dan analisa kinerja dilakukan berdasarkan sasaran-sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut ini turunan Renja OPD Tahun 2024 yang terealisasi dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	: 53,89%
Anggaran	: Rp. 617.944.400
Realisasi	: Rp. 48.151.050
Sisa	: Rp. 284.947.613

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	: 92,32%
Anggaran	: Rp.69.632.493.032
Realisasi	: Rp.64.283.206.281
Sisa	: Rp. 5.349.286.751

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	: 93,35%
Anggaran	: Rp. 1.880.000.000
Realisasi	: Rp. 1.745.933.169
Sisa	: Rp. 125.066.831

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	81,10%
Anggaran	:	Rp. 1.743.816.986
Realisasi	:	Rp. 1.414.215.000
Sisa	:	Rp. 329.601.986

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	83,13%
Anggaran	:	Rp.31.881.089.907
Realisasi	:	Rp.26.504.148.539
Sisa	:	Rp. 5.376.941.368

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	94,08%
Anggaran	:	Rp.20.693.992.150
Realisasi	:	Rp.19.469.258.500
Sisa	:	Rp. 1.224.733.650

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	85,35%
Anggaran	:	Rp.48.699.264.100
Realisasi	:	Rp.41.565.356.486
Sisa	:	Rp. 7.133.907.614

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	94,06%
Anggaran	:	Rp.47.400.020.374
Realisasi	:	Rp.44.583.215.569
Sisa	:	Rp. 2.816.804.805

9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	85,24%
Anggaran	:	Rp.10.687.175.800
Realisasi	:	Rp. 9.109.823.100
Sisa	:	Rp. 1.577.352.700

10. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	96,60%
Anggaran	:	Rp.11.450.000.000
Realisasi	:	Rp.11.060.345.312
Sisa	:	Rp. 389.654.688

Adapun realisasi anggaran Biro Umum dan Perlengkapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	P-APBD	Realisasi	%	Sisa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.944.400	332.996.787	53,89	284.947.613
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.800.000	48.151.050	51,33	45.648.950
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.500.000	38.484.850	99,96	15.150
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.500.000	38.416.025	99,78	83.975
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	38.500.000	38.489.450	99,97	10.550
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	38.500.000	38.449.900	99,87	50.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.000.000	65.950.027	99,92	49.973
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.144.400	65.055.485	21,39	239.088.915
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.632.493.032	64.283.206.281	92,32	5.349.286.751
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.032.811.532	62.271.789.618	92,90	4.761.021.914
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.514.681.500	1.956.521.180	77,80	558.160.320
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	25.000.000	24.930.750	99,72	69.250
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	0	-	30.000.000

Program/Kegiatan	P-APBD	Realisasi	%	Sisa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	30.000.000	29.964.733	99,88	35.267
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.880.000.000	1.754.933.169	93,35	125.066.831
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.650.000.000	1.581.018.069	95,82	68.981.931
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	130.000.000	98.575.900	75,83	31.424.100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	75.339.200	75,34	24.660.800
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.743.816.986	1.414.215.000	81,10	329.601.986
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.220.051.626	1.190.294.000	97,56	29.757.626
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	423.765.360	145.391.000	34,31	278.374.360
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	78.530.000	78,53	21.470.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.881.089.907	26.504.148.539	83,13	5.376.941.368
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	900.000.000	836.340.246	92,93	63.659.754
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.119.183.100	2.271.066.231	72,81	848.116.869
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	542.548.440	541.127.750	99,74	1.420.690
Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.949.200.000	13.494.196.196	90,27	1.455.003.804
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.970.158.367	8.964.196.566	74,89	3.005.961.801

Program/Kegiatan	P-APBD	Realisasi	%	Sisa
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400.000.000	397.221.550	99,31	2.778.450
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.693.992.150	19.469.258.500	94,08	1.224.733.650
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.850.000.000	4.475.860.000	92,29	374.140.000
Pengadaan Mebel	2.530.000.000	2.495.677.000	98,64	34.323.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.313.992.150	12.497.721.500	93,87	816.270.650
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.699.264.100	41.565.356.486	85,35	7.133.907.614
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280.000.000	257.822.000	92,08	22.178.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.550.000.000	7.250.644.383	62,78	4.299.355.617
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.700.000.000	17.260.902.300	97,52	439.097.700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.169.264.100	16.795.987.803	87,62	2.373.276.297
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.400.020.374	44.583.215.569	94,06	2.816.804.805
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	284.000.000	213.949.980	75,33	70.050.020
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	10.983.074.300	9.106.256.675	82,91	1.876.817.625
Pemeliharaan Mebel	800.000.000	746.131.000	93,27	53.869.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40.000.000	40.000.000	100,00	0

Program/Kegiatan	P-APBD	Realisasi	%	Sisa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.105.126.122	32.457.574.544	98,04	647.551.578
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	2.187.819.952	2.019.303.370	92,30	168.516.582
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.687.175.800	9.109.823.100	85,24	1.577.352.700
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	253.933.000	0	-	253.933.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.100.000.000	2.096.330.000	99,83	3.670.000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	8.322.217.800	7.013.493.100	84,27	1.308.724.700
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11.025.000	0	-	11.025.000
Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	11.450.000.000	11.060.345.312	96,60	389.654.688
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	10.250.000.000	10.011.210.653	97,67	238.789.347
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	1.200.000.000	1.049.134.659	87,43	150.865.341
Jumlah	244.685.796.749	220.077.498.743	89,94	24.608.298.006

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah disebabkan karena :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Umum dan Perlengkapan dengan OPD lain
3. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

4. Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan/sub kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
5. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kabupaten/kota.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas, maka perlu diambil beberapa kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
3. Kerjasama dengan pihak OPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

A. BIRO PEMERINTAHAN

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah untuk :

- Meningkatkan kualitas pelayanan administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan isu-isu pemerintahan dan Otonomi Daerah.

2. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat kami sampaikan dalam tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Realisasi Tahun 2025, Pagu Anggaran Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2027

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Realisasi Tahun 2025, Pagu Anggaran
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2027

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2027	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	871.078.016,-	488.160.139,-	56,40	760.084.000,-		2.314.435.000,-		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.480.000,-	59.810.000,-	44,15	192.480.000,-		156.840.000,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.480.000,-	59.810.000,-	44,15	192.480.000,-	1 Laporan	156.840.000,-	1 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian	260.000.000,-	94.681.139,-	59,55%	260.000.000,-		520.000.000,-		

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,-	0.000.000,-	100	10.000.000,-	1 Paket	20.000.000,-	1 Paket	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2027	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,-	4.681.139,-	33,87	250.000.000,-	80 Laporan	500.000.000,-	80 Laporan	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475.598.016,-	333.669.000,-	70,16	147.112.000,-		808.470.000,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	475.598.016,-	333.669.000,-	70,16	147.112.000,-	4 Laporan	808.470.000,-	4 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah								
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2027	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				160.000.000,-		765.000.000,-		
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						765.000.000,-	1 Mobil, 2 Motor	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				160.000.000,-	1 Paket			
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan	3.998.707.550,-	2.328.929.185,-	81,77	89.087.147.507,-	548 Dokumen	5.500.000.000,-		

	Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan									
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Dilaksanakan	902.768.000,-	557.288.085,-	61,73	1.700.000.000,-	325 Dokumen	2.900.000.000,-	325 Dokumen		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2027	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	443.600.000,-	305.357.854,-	68,84	500.000.000	3 Dokumen	1.050.000.000	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Daerah	459.168.000,-	251.930.231,-	54,87	1.200.000.000,-	322 Dokumen	1.850.000.000,-	322 Dokumen	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	2.585.939.550,-	1.323.472.611,-	51,18	1.700.000.000,-	161 Dokumen	1.900.000.000,-	175 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.586.699.550,-	466.234.111,-	29,38	550.000.000,-	100 Dokumen	700.000.000,-	114 Dokumen	100%

	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	999.240.000 ,-	857.238.500,-	85,77	1.150.000.0 00,-	61 Dokum en	1.200.000. 000,-	61 Dokum en	
--	---	---	-------------------	---------------	-------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik Keuangan (%)	Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2027	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Mou yang difasilitasi								
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Di Fasilitasi	610.510.000.000,-	50.448.168.489,-	83,37	85.687.147.507,-	62 Dokumen	700.000.000,-	82 Dokumen	100 %
		Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI dan Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	510.000.000,-	448.168.489,-	87,88					
		Hibah Uang Ombudsman	0.000.000.000,-	0,-	0,00					

		Perwakilan Sumsel								
		Hibah Uang Kepada Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan	0.000.000.000,-	0.000.000.000,-	100					
		Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI dan Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi				687.147.507.-				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan	Realisa si Fisik Keuang an (%)	Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2027	Target Kinerja	Target Keuanga n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Lanjutan Kolam Renang Jasdarn				11.490.604. 470,-				

		II/SWJ, Tribun Kolam, Kolam Renang Anak-Anak, Ruang Bilas/Lobi, Pengaspalan Komplek Jasdam II/SWJ)								
		Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan RS. Tingkat II dr. A.K. Gani Gedung Poliklinik, Rawat Inap dan Prasarana RS. Tingkat II dr. A.K. Gani)				53.509.395. 530,-				
		Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Rumah Dinas As- Ops, As-Intel,As- Ter, Dokter,Ka. Pendamb, Ka.				10.000.000.0 00,-				

		Infolahtadam, Ka. Bintaldam dan Pengaspalan JalanKomplek Sintraman								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan	Realisa si Fisik Keuang an (%)	Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerj a	Prakiraan Maju Tahun 2027	Target Kinerja	Target Keuang an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Sumsel (Pembelian/Pembebb asan Lahan Kantor BPS Sumsel)				4.000.000.0 00,-				
		Hibah Kepada Universitas Sriwijaya (Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP)				6.000.000.0 00,-				
<i>Jumlah.....</i>			869.785.556,-	817.089.324,-	81,42	89.847.231. 507,-		7.814.435. 00,-		

B. BIRO HUKUM DAN HAM

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang• undangan nasional serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
2. Memperkuat pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian perkara guna memberikan perlindungan hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta aparatur melalui penyuluhan dan edukasi hukum yang terpadu;
4. Mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui program-program penyuluhan, pemantauan dan kerjasama lintas sektor;
5. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan isu-isu hukum dan HAM di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah:

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas C. C.v

C. BIRO KESEJAHTERAANA RAKYAT

1. Tujuan Rencana Kerja

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan panduan operasional yang jelas bagi seluruh aparatur di Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program dan kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara terpadu dan konsisten dengan Renstra OPD serta kebijakan pemerintah daerah.
3. Membantu dalam pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja.
4. Menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
5. Menyediakan tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja tahunan OPD secara terukur dan terarah.

2.Sasaran Rencana Kerja

Sasaran Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2026

No	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
I	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1.573.905.612	100%	100%
1	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.100.000		100%
	4.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.100.000	4 Laporan	
2	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	188.892.000		100%
	4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	188.892.000	6 Laporan	
3	4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi	50.000.000		100%

			Kepegawaian Perangkat Daerah			
	4.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	3 Orang	
4	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.483.612		100%
	4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	121.000.000	10 paket	
	4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	51.483.612	6 Paket	
	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	150 Laporan	
5	4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.750.000		100%
	4.01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	332.750.000	15 Unit	

6	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.820.000		100%
	4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	116.820.000	1 Laporan	
7	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.860.000		100%
	4.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79.860.000	10 Unit	
II	4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	43.353.268.244	100%	100%
8	4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual yang ditindaklanjuti	42.497.865.244	100%	100%
	4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	25.973.050.000	9 unit	
	4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	16.524.603.244	7 lembaga	

9	4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	291.865.000	100%	100%
	4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	68.170.000	1 Dokumen	
	4.01.04.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	109.195.000	1 Dokumen	
	4.01.04.1.02.03	Sub Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	114.500.000	1 Dokumen	
10	4.01.04.1.03	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	563.750.000	100%	100%
	4.01.04.1.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	332.750.000	1 Dokumen	

	4.01.04.1.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana, administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	102.000.000	1 Dokumen	
	4.01.04.1.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	129.000.000	1 Dokumen	
	JUMLAH			44.927.173.856		

D. BIRO PEREKONOMIAN

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
2. Mememperkuat pelayanan administratif serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah :

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

<i>No.</i>	<i>Kode Rekening</i>	<i>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan</i>	<i>Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026</i>	<i>Targe t Kinerj a</i>	<i>Target Keuangan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>A.</i>	<i>4.01.01</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>831.240.144</i>		
<i>I</i>	<i>4.01.01.1.02</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>169.886.000</i>		
<i>1</i>	<i>4.01.01.1.02.02</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>169.886.000</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>

II	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persetase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	297.793.000		
2	4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.000.000	1 Paket	100%
3	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.793.000	1 Paket	100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Targe t Kinerj a	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
III	4.01.01.1.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.561.144		
4	4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	188.561.144	1 Laporan	100%
IV	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000		
5	4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75,000,000	1 Laporan	100%

V	4.01.01.1.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah</i>	100.000.000		
6	4.01.01.1.05.09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan</i>	100.000.000		100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Targe t Kinerj a	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
B	4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana	2.628.421.475		
VI	4.01.06.01.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia	820.481.900		

7	4.01.05.1.01.01	<i>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>	489.313.500	2 Dokumen	100%
8	4.01.05.1.01.02	<i>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>	331.168.400	2 Dokumen	100%

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
VII	4.01.06.01.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik	907.069.575		
15	4.01.06.01.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	229,786,000	2 Dokumen	100%

16	4.01.06.01.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	318,779,125	1 Dokumen	100%
17	4.01.06.01.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	358,504,450	1 Dokumen	100%
VIII	4.01.06.01.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	900.870.000		
	4.01.06.01.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	128.068.350	1 Dokumen	100%
	4.01.06.01.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	103.412.500	1	100%

		Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		<i>Dokumen</i>	
	<i>4.01.06.01.03.03</i>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD	493.770.500	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>
	<i>4.01.06.01.03.04</i>	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	101.694.650	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>
	<i>4.01.06.01.03.05</i>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD	73.924.000	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>
<i>Jumlah.....</i>				3.459.661.619		

E. BIRO ADMNISTRASI PEMBANGUNAN

1. Tujuan dan Sasaran Serta Sasaran Kinerja 2026

Tujuan dan sasaran serta target kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Tujuan dan Sasaran Kinerja 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2026
terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	

2. Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Biro Adm.Pembangunan Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AGU 2026 (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.126.127.269
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.160.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.000.000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.967.269
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemDa	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	450.000.000
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.000.000
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	684.500.000
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	205.000.000
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	91.500.000
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	100.000.000
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
	- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	91.500.000
	- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	105.000.000
	- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	91.500.000
TOTAL		1.810.627.269

F. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tugas pokok Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 42 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yakni membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

Rincian tujuan, sasaran dan analisis capaian dapat diuraikan sebagai berikut :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Tujuan | : | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan |
| 2 | Sasaran | : | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan reponsif |
| 3 | Sasaran Strategis | : | Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan |

2. Indikator Kinerja dan Program Kegiatan

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Biro Pengadaan Barang/Jasa

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2026
1	2	3	4	7
IKU OPD				
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Angka	72
PENGADAAN				
2	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100
		Persentase jumlah pengadaaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	56
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	27
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA				
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100
		Persentase Kebijakan dan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100

Total Anggaran Belanja APBD Tahun 2026 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 6.767.345.204,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Program/Kegiatan APBD Biro PBJ Setda Tahun Anggaran 2026

N O	URAIAN	APBD TA 2025	APBD TA.2026	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	BELANJA OPERASI	5.775.718.204	6.567.345.204	791.627.000
	a) Belanja Pegawai			
	b) Belanja Barang dan Jasa	5.775.718.204	6.567.345.204	791.627.000
2	BELANJA MODAL	957.000.000	200.000.000	(757.000.000)
	a) Belanja Modal Tanah			
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	957.000.000	200.000.000	(757.000.000)
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
	Total Belanja	6.732.718.204	6.767.345.204	34.627.000

RINCIAN PER BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

BELANJA OPERASI : 6.567.345.204

- Belanja Pegawai : -
- Belanja Barang dan Jasa : 6.567.345.204

BELANJA MODAL : 200.000.000

TOTAL : 6.767.345.204

Dengan penjelasan, terdiri dari 2 Program, 8 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

A. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sebesar Rp. 251.000.000,- Untuk pembayaran Honorarium KPA dan PPTK sesuai Standar Biaya Umum

B. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 75.000.000,- Untuk pembayaran Diklat PIM II, III dan IV Tahun 2026

C. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 20.000.000,- Biaya konsumsi Rapat Rutin pada Biro PBJ selama Tahun 2026
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 60.000.000,- Biaya perjalanan dinas rutin kantor dalam daerah dan luar daerah selama Tahun 2026

D. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 200.000.000,-

Pembelian sarana dan prasarana untuk kantor pada Biro Pengadaan Barang/Jasa

E. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 170.000.000,-
 - d. Belanja Jasa Tenaga Kerja PPPK Paruh Waktu selama 13 bulan
 - e. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

II. PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

7. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 300.000.000,-
 - d. Melakukan analisa pasar .
 - e. penyusunan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa.
 - f. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan
8. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 300.000.000,-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
9. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 1.500.000.000,-
 - a. Pengelolaan Katalog
 - b. Pelaksanaan Tender dan seleksi PBJ

B. KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

10. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebesar Rp 700.000.000,-
Pembayaran Sewa Internet dan sewa Rak Collocation selama 1 tahun.
11. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 400.000.000,-
Pembayaran pemeliharaan software selama 1 tahun dan Monev LPSE
12. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 300.000.000,-
Pengelolaan Informasi terkait pengadaan Barang dan Jasa berupa dokumentasi dan penyampaian informasi terkait pengadaan barang dan jasa.

C. KEGIATAN PEMBINAAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

13. Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ sebesar Rp 941.345.204,-
 - a. Pengelolaan kegiatan rutin kantor
 - b. Pembinaan SDM PBJ
 - c. Peningkatan kompetensi SDM PBJ
 - d. Ujian Sertifikasi
 - e. Kontribusi Pelatihan
14. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 850.000.000,-
 - a. Rakor UKPBJ Se Provinsi Sumsel
 - b. Penyusunan Tingkat Kematangan UKPBJ
 - c. Peningkatan Nilai ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan)
15. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 700.000.000,-
 - a. Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan UKPBJ Kab/Kota dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Sosialisasi PBJ.

Tabel 3.8.
Prakiraan Maju Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2027

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PAGU ANGGARAN TAHUN 2027
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.970.440.289
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	257.275.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.275.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	

	Daerah	100.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.165.289
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.165.289
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000
II	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.890.046.985
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.550.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	750.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	450.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.615.046.985
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.815.046.985
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	450.000.000

	Barang dan Jasa	
	Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.725.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	950.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	875.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000
	TOTAL	8.860.487.274

G. BIRO ORGANISASI

1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Renja ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, lincah, dan responsif terhadap tuntutan publik serta dinamika perubahan global. Melalui serangkaian program dan kegiatan, Biro Organisasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa struktur serta fungsi kelembagaan pemerintah berjalan optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Renja Biro Organisasi Tahun 2026 menetapkan sasaran strategis yang saling terkait:

1. *Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tata Laksana.*

Sasaran ini berfokus pada penyempurnaan struktur organisasi dan proses kerja di lingkungan pemerintahan. Melalui kajian dan analisis mendalam, Biro Organisasi akan mengidentifikasi area yang membutuhkan perampingan, reorganisasi, atau penyesuaian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan duplikasi tugas, mempercepat alur kerja, dan memastikan setiap unit kerja memiliki peran yang jelas dan relevan.

2. *Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap instansi pemerintah bertanggung jawab penuh atas kinerja dan pencapaiannya. Biro Organisasi akan memfasilitasi penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat, transparan, dan terukur. Ini termasuk penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta mendorong penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih spesifik dan realistis.

3. *Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.*

Sasaran ini adalah inti dari upaya modernisasi birokrasi. Biro Organisasi akan berperan aktif dalam mendorong dan mengawasi implementasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkatan. Fokus utamanya adalah pada penerapan sistem manajemen berbasis elektronik (e-government), penyederhanaan prosedur pelayanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Sasaran ini juga mencakup upaya untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepuasan publik.

2. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2026 disusun untuk menerjemahkan sasaran strategis ke dalam aksi nyata melalui serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur. Program-program ini dirancang untuk mencapai birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Program kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja (Renja) Tahun 2026 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi*

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
7. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
11. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

12. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

VI. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

B. *Program Penataan Organisasi*

VIII. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

17. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Provinsi
18. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota
19. Sub Kegiatan Analisis Jabatan

IX. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

20. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
21. Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
22. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
23. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
24. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Tabel 3.9

Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat. Penti ng	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket.
				5 Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				2,099,063,400				2,212,476,000			
A.	4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	1,180,518,800	APBD		100%	1,265,476,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik	
I.	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	20,500,000	APBD		100%	21,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.01.01	1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	20,500,000	APBD		1 Dok.	21,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
II.	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	170,000,000	APBD		100%	175,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.02.02	2. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	170,000,000	APBD		1 Dok.	175,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
III.	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	192,800,000	APBD		100%	202,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.1.05.09	7. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Perangkat Daerah	2 Orang	10,000,000	APB D		2 Orang	11,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	

	4.01.01.1.05.11	8. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Perangkat Daerah	2 Orang	10,000,000	APB D		2 Orang	11,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
IV.	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	391,368,800	APB D		100%	400,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.06.04	9. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	1 Paket	91,000,000	APB D		2 Paket	93,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik	

											yang Efisien		
	4.01.01.1.06.09	10 Sub-Kegiatan . Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kanto r Peran gkat Daer ah	1 Lapo ran	250,368,800	APB D		1 Lapo ran	256,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transf ormasi Pelay anan Publik	
	4.01.01.1.06.11	11 Sub-Kegiatan . Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kanto r Peran gkat Daer ah	1 Dok.	50,000,000	APB D		1 Dok.	51,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transf ormasi Pelay anan Publik	
V.	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan	Kanto r Peran	100%	177,350,000	APB D		100%	235,476,000	Peningkatan Jenis	Transf ormasi Pelay	

			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	gkat Daer ah							Pelaya nan Publik yang Efisien	anan Publik	
	4.01.01.1. 07.02	12	Sub-Kegiatan . Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kanto r Peran gkat Daer ah	1 M ot or (R 2)	27,350,0 00	APB D		3 Unit R4	80,476,0 00	Pening katan Jenis Pelaya nan Publik yang Efisien	Transf ormasi Pelay anan Publik	
	4.01.01.1. 07.10	13	Sub-Kegiatan . Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kanto r Peran gkat Daer ah	10 Unit	150,000, 000	APB D		10 Unit	155,000, 000	Pening katan Jenis Pelaya nan Publik yang Efisien	Transf ormasi Pelay anan Publik	

VI.	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Peran gkat Daerah	100 %	100,000,000	APB D		100%	101,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.08.04	14 Sub-Kegiatan . Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor Peran gkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	APB D		1 Laporan	101,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
				Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	128,500,000	APBD		100%	131,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.09.08	15 Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kantor Perangkat	5 Unit	70,000,000	APBD		5 Aplikasi	71,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan	Transformasi Pelayanan	

				Daerah							an Publik yang Efisien	an Publik	
	4.01.01.1.09.09	16 Sub-Kegiatan . Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kantor Perangkat Daerah	1 Unit	58,500,000	APBD		1 Unit	60,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
B.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi		7.19	918,544,600	APBD		100%	947,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik	
VIII.	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitas	Kantor Perangkat	100%	317,460,000	APBD		100%	324,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan	Transformasi Pelayanan	

			<i>Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	<i>Daerah</i>							<i>an Publik yang Efisien</i>	<i>an Publik</i>	
	4.01.02.1.01.01	17 Sub-Kegiatan . Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	dlm daerah, luar Daerah	1 dok	80,560,000	APBD		1 dok	82,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.01.02	18 Sub-Kegiatan . Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	dalam daerah	1 dok	76,900,000	APBD		1 dok	78,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.01.03	19 Sub-Kegiatan . Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan,	Kantor Perangkat	2 dok	160,000,000	APBD		2 dok	164,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan an	Transformasi Pelayanan	

				<i>Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan</i>	<i>Daerah</i>							<i>Publik yang Efisien</i>	<i>dan Publik</i>	
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-------------------	--

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket.
				Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX.	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kantor Perangkat Daerah	100%	601,084,600	APBD		100%	623,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.02.01	20 Sub-Kegiatan Pembinaan . Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dalam Daerah,	1 dok	142,070,000	APBD		1 dok	145,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik	

					<i>Luar Daerah</i>						<i>yang Efisien</i>		
	4.01.02.1.02.02	21	Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	<i>Dalam Daerah, Luar Daerah</i>	2 dok	167,019,600	APBD		2 dok	170,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.03	22	Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	<i>Kantor Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	77,860,000	APBD		1 Laporan	90,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.04	23	Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	<i>Dalam Daerah, Luar</i>	1 dok	128,135,000	APBD		1 dok	130,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik

					<i>Daerah</i>									
	4.01.02.1.02.05	24	<i>Sub-Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>	<i>Dalam Daerah, Luar Daerah</i>	<i>1 dok</i>	<i>86,000,000</i>	<i>APBD</i>		<i>1 dok</i>	<i>88,000,000</i>	<i>Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien</i>	<i>Transformasi Pelayanan Publik</i>	
<i>Jumlah</i>							<i>2,099,063,400</i>				<i>2,212,476,000</i>			

H. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang akan digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2025 - 2029.

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Biro Umum dan Perlengkapan adalah :

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

2. Sasaran

Sasaran yang relevan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Efisiensi dan Ketepatan Layanan
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan modern
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perlengkapan dan aset
- Penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026

➤ Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) subkegiatan dengan nilai Pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 261.000.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar rupiah).

➤ Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas

Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan memiliki program strategis yaitu “Sumsel Berintegritas dan Melayani” yang menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani. Adapun kegiatan/sub kegiatan menjadi prioritas dalam mendukung program pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 26.000.000.000,-
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 30.082.441.548,-

Penjabaran Program kerja di atas yang menggambarkan indikator kinerja dan kelompok sasaran, dana indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci dijelaskan pada tabel Rencana Kerja (Renja) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel di bawah ini :

Tabel 3.10
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Palemba ng	100%				100%	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palemba ng	100%	459.838.000			100%	505.821.800

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Palemba ng	3 Dokume n	120.898.000	PAD		3 Dokume n	132.987.800
4.01.01.1.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Palemba ng	2 Dokume n	46.585.000	PAD		2 Dokume n	51.243.500
4.01.01.1.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palemba ng	2 Dokume n	46.585.000	PAD		2 Dokume n	51.243.500

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Palemba ng	2 Dokume n	46.585.000	PAD		2 Dokume n	51.243.500
4.01.01.1.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palemba ng	2 Dokume n	46.585.000	PAD		2 Dokume n	51.243.500
4.01.01.1.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Palemba ng	2 Dokume n	72.600.000	PAD		2 Dokume n	79.860.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
4.01.01.1.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palemba ng	3 Dokume n	80.000.000	PAD		3 Dokume n	88.000.000
4.01.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palemba ng	100%	71.258.003.00 0			100%	78.383.803.30 0
4.01.01.1.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palemba ng	347 Orang/ Bulan	70.054.503.00 0	DAU dan PAD		347 Orang/ Bulan	77.059.953.30 0

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palemba ng	12 Dokumen	1.100.000.000	PAD		12 Dokumen	1.210.000.000
4.01.01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Palemba ng	5 Dokumen	37.500.000	PAD		5 Dokumen	41.250.000
4.01.01.1.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palemba ng	1 Laporan	33.000.000	PAD		1 Laporan	36.300.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	4 Laporan	33.000.000	PAD		4 Laporan	36.300.000
4.01.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Palembang	100%	2.103.000.000	PAD		100%	2.103.000.000
4.01.01.1.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	1 Dokumen	1.850.000.000	PAD		1 Dokumen	1.650.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palemba ng	4 Laporan	143.000.000	PAD		4 Laporan	143.000.000
4.01.01.1.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palemba ng	1 laporan	110.000.000	PAD		1 laporan	310.000.000
4.01.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palemba ng	100%	350.900.000	PAD		100%	350.900.000
4.01.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Palemba ng	1 Paket		PAD		2 Paket	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palemba ng	5 Orang	185.900.000	PAD		4 Orang	185.900.000
4.01.01.1.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Sosialisasi	Palemba ng			PAD		10 Orang	
4.01.01.1.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palemba ng	25 Orang	165.000.000	PAD		40 Orang	165.000.000
4.01.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palemba ng	100%	40.837.119.95 2			100%	39.837.119.95 2

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Palembang	10 Paket	1.016.119.952	PAD		7 Paket	1.016.119.952
4.01.01.1.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	Palembang	12 Paket	3.871.000.000	PAD		12 Paket	3.871.000.000
4.01.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Palembang	12 Paket	550.000.000	PAD		12 Paket	550.000.000
4.01.01.1.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	12 Dokumen	26.000.000.000	PAD		12 Dokumen	26.000.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palemba ng	12 Laporan	9.000.000.000	PAD		12 Laporan	8.000.000.000
4.01.01.1.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palemba ng	6 Dokumen	400.000.000	PAD		6 Dokumen	400.000.000
4.01.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Palemba ng	100%	18.598.279.700			100%	18.598.279.700
4.01.01.1.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau	Palemba ng	R4 = 4 Unit	5.798.279.700	PAD		R4 = 4 Unit	5.798.279.700

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		lapangan yang disediakan							
4.01.01.1.0 7.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit yang disediakanPengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	1	270.000.000	PAD		1 Unit	270.000.000
4.01.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Palembang	4 Paket	2.530.000.000	PAD		4 Paket	2.530.000.000
4.01.01.1.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan gedung prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Palembang	50 Unit	10.000.000.000	PAD		50 Unit	10.000.000.000
4.01.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Palembang	100%	57.991.087.548			100%	57.991.087.548

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemerintahan Daerah							
4.01.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	4 Laporan	200.000.000	PAD		4 Laporan	200.000.000
4.01.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Provinsi Sumsel	50 Laporan	13.000.000.000	PAD		50 Laporan	13.000.000.000
4.01.01.1.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab/Kota Se-Sumsel	36 Laporan	30.082.441.548	PAD		36 Laporan	30.082.441.548
4.01.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Palembang	36 Laporan	14.708.646.000	PAD		36 Laporan	14.708.646.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kantor yang disediakan							
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palembang	100%	46.963.074.300			100%	46.959.099.300
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Palembang	2 unit	1.000.000.000	PAD		2 unit	1.000.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kendaraan Dinas Jabatan								
4.01.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Palembang	210 unit	12.983.074.300	PAD		210 unit	12.983.074.300
4.01.01.1.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Palembang	50 unit	880.000.000	PAD		50 unit	880.000.000
4.01.01.1.0 9.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang	Palembang	30 Unit	30.000.000.000	PAD		30 Unit	30.000.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Bangunan Lainnya	dipelihara/direhabilitasi							
4.01.01.1.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Palembang	200 Unit	2.100.000.000	PAD		200 Unit	2.096.025.000
4.01.01.1.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Palembang	100%	7.088.697.500			100%	7.092.672.500

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.1 1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Palemba ng	1 orang/ 12 Bulan	273.162.500	DAU		2 orang/ 12 Bulan	273.162.500
4.01.01.1.1 1.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	Palemba ng	4 Paket	2.200.000.000	PAD		8 Paket	2.200.000.000
4.01.01.1.1 1.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH	Palemba ng	4 Orang	11.025.000	PAD		2 Orang	15.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.1 1.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Palemba ng	1 orang/ 12 Bulan	4.604.510.000	PAD		2 Orang/ 12 Bulan	4.604.510.000
4.01.01.1.1 2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Palemba ng	100%	15.350.000.000			100%	15.350.000.000
4.01.01.1.1 2.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Palemba ng	30 Paket	11.500.000.000	PAD		50 Paket	11.500.000.000
4.01.01.1.1 2.02	Penyediaan Kebutuhan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	Palemba ng	0 Paket	2.250.000.000	PAD		30 Paket	2.250.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.1 2.03	Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Palembang	15 Paket	1.600.000.000	PAD		20 Paket	1.600.000.000
		Total Pagu			261.000.000.000				267.171.784.100

Dari uraian di atas, diketahui Biro Umum dan Perlengkapan hanya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) di dalamnya terdapat **Belanja Operasi** (meliputi : Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah) dan **Belanja Modal** (meliputi : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset tetap Lainnya).

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini termasuk dalam program rutin Sekretariat Daerah, dengan kegiatannya meliputi :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	459.838.000,-
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	71.258.003.000,-
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	2.103.000.000,-
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	350.900.000,-
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	40.837.119.952,-
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	18.598.279.700,-
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	57.991.087.548,-
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	46.963.074.300,-
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.	7.088.697.500,-
j. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.	15.350.000.000,-

I. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan:

2. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah :

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas :

Tabel 3.11

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Targe t Kinerj a	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
A.	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	43.440.964.858		
I	4.01.01.1.01	Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000		100%

1	4.1.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	1 Laporan	
II	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	229.000.000		100%
2	4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	229.000.000	1 Dokumen	100%

III	4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	272.000.000		100%
3	4.01.01.0.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	192.000.000	1 Paket	
4	4.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000	2 Orang	
5	4.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	40.000.000	10 Orang	

IV	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persetase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.150.000.000		100%
6	4.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	2.000.000.000	1 Dokumen	
7	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	1 Laporan	

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Targe t Kinerj a	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
V	4.1.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	400.000.000		100%
8	4.1.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	

9	4.01.01.1.07.10	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	400.000.000	10 Unit	
IV	4.01.01.1.08	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	390.050.000		100%
10	4.01.01.0.08.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	80.000.000	1 Laporan	
11	4.01.01.1.08.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan</i>	310.050.000	1 Laporan	

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
VII	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000		100%
12	4.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50.000.000	25 Unit	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			

13	4.01.01.1.09.10	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60.000.000	10 Unit	
VIII	4.01.01.1.13	Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	30.064.914.858		100%
14	4.01.01.1.13	Sub Kegiatan Penyiapan Materi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	3.800.000.000	5 Dokumen	
15	4.01.01.1.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.700.000.000	1 Laporan	
16	4.01.01.1.13.02	Sub Kegiatan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	23.664.914.858	1 Laporan	

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pagu Anggaran Tahun 2026	Targe t Kinerj a	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
X	4.01.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persentase Peningkatan Fasilitas Keprotokolan	9.700.000.000		100%
17	4.01.01.1.14.01	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksana Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	5.500.000.000	1 Laporan	
18	4.01.01.1.14.02	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000.000	1 Laporan	

			<i>Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</i>			
19	4.01.01.1.14.03	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>	700.000.000	1 Laporan	

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, disadari dalam penyusunan RENJA Setda Provinsi Sumatera Selatan ini terdapat kekurangan karena keterbatasan baik jumlah maupun pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Palembang,

2025

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA